HARIAN
UNTUK UMUM
TERBIT SEJAK
01 MARET 2011
PENDIRI
ARDI, S.Si, Apt
EDISI: SELASA
13 OKTOBER 2026

BUTON-BUTENG-BUSEL-BUTUR-WAKATOBI-MUNA-MUBAR
KOLAKA-BOMBANA-KENDARI-BAUBAU

Baubau Post

KORAN NOMOR SATU DI KEPULAUAN BUTON

www.baubaupost.com
www.durasitimes.com

ECERAN Rp 5.000 | BERLANGGANAN RP 100.000/ BULAN | LANGGANAN & IKLAN HUBUNGI HP/WA: 082160543989



Bupati Azhari Siapkan Rp250 Juta untuk Pengembangan Kawasan Masjid Nurhasanah Sebagai Ikon Buton Tengah

Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BUTON TENGAH, BP-Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menyiapkan anggaran awal Rp250 juta untuk menata kawasan Masjid Nurhasanah di Desa Teluk Lasongko menjadi kawasan terpadu yang berpotensi menjadi ikon daerah. Program tersebut mencakup perbaikan fisik masjid dan rencana pembangunan alun-alun sebagai bagian dari upaya

Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, menyampaikan rencana itu seusai salat Jumat berjamaah di Masjid Nurhasanah, Jumat (9/10/2026). Pemerintah daerah memandang penataan kawasan tersebut perlu dilakukan secara terencana agar masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat aktivitas keagamaan dan ruang berkumpul masyarakat.

Untuk mempercepat pembangunan, pemerintah daerah berencana mengambil alih sementara pengelolaan masjid. Kebijakan itu diarahkan untuk mempermudah koordinasi penataan kawasan, termasuk perbaikan bangunan dan pengembangan fasilitas pendukung. Meski demikian, Azhari menegaskan bahwa langkah tersebut tidak dimaksudkan untuk mengalihkan kepemilikan aset dari desa dan masyarakat.

"Masyarakat Desa Teluk Lasongko tidak perlu khawatir, aset ini tidak akan dialihkan. Kami mengambil alih sementara agar pembangunannya lebih cepat dan tertata bagus," kata Azhari.

Ia meminta Kepala Desa Teluk Lasongko menyiapkan surat keputusan (SK) pengelolaan kepada pemerintah daerah sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut. Setelah pembangunan rampung, pengelolaan masjid akan dikembalikan sepenuhnya kepada pemerintah desa

Lanjut ke Hal: 7

DP3AKB dan RSUD Baubau Integrasikan Layanan bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak



Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP-Perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Baubau akan memperoleh penanganan medis dan pendampingan psikologis melalui layanan terpadu yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) bersama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Baubau. Kolaborasi ini diarahkan untuk

Lanjut ke Hal: 7

Danantara Tinjau Tambang Buton, Tegaskan Tak Ada Pabrik



Laporan: La Harman

BUTON, BP- Danantara bersama sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) mengkaji kesiapan Aspal Buton (Asbuton) untuk mendukung kebutuhan infrastruktur nasional setelah meninjau fasilitas produksi, pertambangan, dan pelabuhan di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Kamis (1/10/2026). Kunjungan yang didampingi Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra, S.H., tersebut sekaligus meluruskan isu pembangunan pabrik Aspal Buton di Karawang, Jawa Barat, serta mengevaluasi kesiapan bahan baku dan distribusi produk lokal.

Lanjut ke Hal: 7

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Optimalkan Program Yon TP 871 untuk Tingkatkan Produksi Cabai Daerah



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP- Bupati Buton Selatan, H. Muhammad Adios, mendorong perluasan areal tanam cabai melalui program pertanian Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) 871/Lamaindo untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga kestabilan pasokan dan harga di pasar. Dorongan itu disampaikan saat meninjau pengembangan pertanian, peternakan, dan perikanan satuan tersebut, Jumat (9/10/2026).

Cabai menjadi perhatian karena perubahan pasokannya dapat memengaruhi harga pangan yang dibayar masyarakat. Adios menilai peningkatan produksi lokal perlu dilakukan secara berkelanjutan agar ketersediaan komoditas tersebut lebih terjaga. Perluasan lahan tanam diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap pasokan, meski stabilitas harga juga dipengaruhi distribusi, biaya produksi, dan kondisi pasar.

Dalam peninjauan itu, Komandan Yon TP 871/Lamaindo, Letkol Inf. Wahyu Dwi Kriswanto, menjelaskan perkembangan budidaya berbagai

Lanjut ke Hal: 7

Revisi RTRW Buton Selatan Cegah Tumpang Tindih Lahan, Kantah Buton Selatan Perkuat Akurasi Data Spasial



Laporan: Firman

BUTON SELATAN, BP- Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Buton Selatan menyiapkan bantuan teknis untuk mempercepat penyusunan dan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Langkah ini ditempuh bersama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan guna menyelaraskan data spasial dan pertanahan, mencegah tumpang tindih pemanfaatan lahan, ser-

Lanjut ke Hal: 7

Gerindra Apresiasi Dukungan Golkar untuk Prabowo Maju Capres pada Pilpres 2029



Jubir Partai Gerindra Sugiat Santoso mengapresiasi langkah Partai Golkar yang akan mendukung Prabowo Subianto sebagai capres pada 2029 mendatang

Laporan: Rahmat

JAKARTA, BP- Partai Golkar menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto untuk kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2029. Sikap tersebut mendapat apresiasi dari Partai Gerindra, yang menyebut aspirasi serupa juga berkembang di kalangan kadernya, meski penentuan calon wakil presiden masih menjadi kewenangan Prabowo.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan sikap partainya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/10). Menurut dia, Golkar telah menetapkan posisi politik untuk menghadapi kontestasi kepresidenan mendatang, tetapi belum menentukan figur yang akan mendampingi Prabowo.

"Standing position Golkar kan jelas, bahwa kami menghadapi Pilpres tahun 2029, kami sudah punya calon namanya Pak Prabowo, ya," kata Doli kepada wartawan.

Doli menjelaskan, penentuan calon wakil presiden umumnya dilakukan mendekati masa pendaftaran pasangan calon. Karena itu, Golkar belum menetapkan sosok yang akan didukung untuk posisi tersebut. Komposisi pasangan calon masih terbuka untuk dibahas lebih lanjut menjelang tahapan pencalonan.

Merespons pernyataan Golkar, Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut. Ia menilai dukungan dari partai politik lain menjadi sinyal positif bagi Prabowo dalam menghadapi kemungkinan pencalonan kembali pada 2029.

"Ya, prinsipnya kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungan dari kawan-kawan partai lain terhadap Pak Prabowo pada Pilpres 2029," ujar Sugiat kepada wartawan, Sabtu (10/10), seperti dikutip dari detikNews.

Sugiat mengatakan, keinginan agar Prabowo kembali maju sebagai calon presiden juga disampaikan kader Gerindra di tingkat akar rumput. Aspirasi tersebut, menurut dia, telah berkembang di internal partai. Namun, keputusan pencalonan tetap mengikuti mekanisme internal dan kewenangan pimpinan partai.

Mengenai calon wakil presiden, Sugiat menegaskan bahwa Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk menentukan pendampingnya serta mengambil keputusan strategis terkait Pilpres 2029. Gerindra, kata dia, akan mengikuti keputusan Prabowo dalam kapasitasnya sebagai ketua umum sekaligus Ketua Dewan Pembina partai.

"Kami memberi kewenangan penuh kepada Pak Prabowo yang memutuskan sebagai ketua umum DPP sekaligus ketua Dewan Pembina. Prinsipnya kami tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan Pak Prabowo," kata Sugiat.

Meski pembicaraan mengenai Pilpres 2029 mulai mengemuka, Sugiat menyebut Gerindra masih memprioritaskan pelaksanaan pemerintahan. Kader partai diarahkan untuk mengawal dan menyukseskan program-program prioritas Prabowo, terutama kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan serta kebutuhan hidup masyarakat.

Dukungan Golkar kepada Prabowo juga mengingatkan pada dinamika koalisi dalam sejarah politik Indonesia. Dalam Pilpres 2014 dan 2019, Prabowo pernah maju sebagai calon presiden dan menghadapi Joko Widodo. Pada Pilpres 2024, Prabowo akhirnya terpilih sebagai presiden bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Perjalanan tersebut memperlihatkan perubahan konfigurasi dukungan partai dari satu pemilihan ke pemilihan berikutnya.

Dalam sistem presidensial Indonesia, pencalonan presiden dan wakil presiden melibatkan dukungan partai politik atau gabungan partai politik sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan pemilu. Dukungan politik yang disampaikan sejak dini dapat menjadi modal awal bagi penjajakan koalisi, tetapi tidak dengan sendirinya menetapkan pasangan calon secara resmi. Kepastian pencalonan Prabowo maupun figur pendampingnya pada 2029 masih bergantung pada perkembangan politik dan proses pencalonan yang berlaku.(*)

Bobby Nasution Minta Polemik Ijazah Gibran Tak Menggeser Kepentingan Rakyat



Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sekaligus adik ipar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan yang menyoal ijazah Gibran sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024.

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP- Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan wacana pemakzulan tidak mengalihkan perhatian publik dari persoalan kebutuhan dasar masyarakat. Pernyataan itu disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024.

Bobby, yang merupakan adik ipar Gibran, menilai persoalan yang dihadapi masyarakat semestinya menjadi prioritas dibandingkan perdebatan politik mengenai jabatan Wakil Presiden. Menurut dia, keluhan warga terkait kebutuhan mendasar masih memerlukan penyelesaian konkret dari pemerintah dan para pemangku kepentingan.

"Masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Saya rasa yang harus diutamakan itu," ujar Bobby, Jumat (9/10/2026).

Selain menyoroti wacana pemakzulan, Bobby menanggapi perdebatan mengenai ijazah SMA Gibran. Ia menyarankan pihak yang mempersoalkan dokumen pendidikan tersebut agar turut mempertanyakan gelar sarjana Gibran. Bobby membandingkan polemik itu dengan persoalan ijazah sarjana Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang sebelumnya menjadi perdebatan publik.

"Kalau Pak Jokowi kan yang dipermasalahkan sarjananya. Nanti Mas Gibran dipermasalahkan SMA. Saran saya, sekalian saja dipermasalahkan sarjananya," kata Bobby.

Ia menyatakan, berdasarkan pengetahuannya, Gibran mempunyai ijazah SMA yang menjadi dasar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di luar negeri. Bobby juga menyebut Gibran telah menyelesaikan pendidikan sarjana. "Ya, Mas Gibran setahu saya sarjana, ya," ujarnya.

Di sisi hukum, MK menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang mempersoalkan keabsahan persyaratan pendidikan Gibran dalam pencalonan pada Pilpres 2024. Alasannya, para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Putusan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum itu tidak dengan sendirinya merupakan penetapan bahwa seluruh dalil mengenai dokumen pendidikan telah terbukti atau terbantahkan.

Dalam pertimbangan yang dibacakan hakim konstitusi Adies Kadir, MK menyatakan tidak menemukan dokumen yang meyakinkan untuk membuktikan bahwa Gibran memiliki ijazah atau dokumen kelulusan pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat. Mahkamah juga menyebut persoalan tersebut menjadi ranah lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan hukum, dengan mempertimbangkan bahwa Gibran bukan lagi berstatus sebagai calon wakil presiden.

Polemik mengenai dokumen pendidikan pejabat publik berkaitan dengan tuntutan transparansi dan kepastian hukum dalam proses demokrasi. Dalam sejarah Indonesia, persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden telah diatur dalam peraturan pemilihan umum, termasuk ketentuan mengenai tingkat pendidikan. Pada tingkat internasional, prinsip pemilu yang demokratis juga menekankan pentingnya aturan pencalonan yang jelas, penerapan hukum yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga berwenang.

Karena itu, perbedaan antara kritik politik, pembuktian administratif, dan putusan hukum perlu dijaga agar perdebatan publik tidak mendahului kewenangan lembaga yang berwenang. Sementara itu, pernyataan Bobby menempatkan kebutuhan dasar masyarakat sebagai isu yang menurutnya perlu memperoleh perhatian lebih besar di tengah polemik politik yang berkembang.(*)

Di Hadapan Zulkifli Hasan, Gubernur Sultra ASR Tekankan Pemerintahan Bersih untuk Bangun Sultra



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-" Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan kolaborasi lintas pihak untuk memastikan pembangunan daerah berjalan di tengah keterbatasan fiskal. Dari kemampuan fiskal sekitar Rp4 triliun, lebih dari Rp3 triliun terserap untuk gaji dan tunjangan, sementara anggaran untuk pembangunan fisik disebut hanya Rp327 miliar.

Pernyataan itu disampaikan Andi Sumangerukka saat menghadiri pelantikan pengurus DPW dan DPD Partai Amanat Nasional (PAN) se-Sultra periode 2024-2029 di Hotel Claro Kendari, Selasa (6/10/2026) malam. Acara tersebut dihadiri Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, serta jajaran pengurus PAN dari berbagai daerah di Sultra.

Keterbatasan anggaran, menurut gubernur, menuntut pemerintah daerah menetapkan prioritas secara cermat. Setiap belanja harus dikelola dengan transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat sasaran agar potensi sumber daya Sultra dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Kita memilih tata kelola pemerintahan yang bersih, agar dana itu transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Sehingga kekayaan yang kita miliki saat ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara," kata Andi Sumangerukka.

Ia menilai, upaya pembangunan tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah. Kerja sama dengan berbagai unsur, termasuk partai politik, diperlukan untuk menjawab persoalan daerah dan memperluas dukungan terhadap program pembangunan. "Pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri-sendiri. Perlu adanya kolaborasi, perlu ada kerja sama," ujarnya.

Dalam konteks tersebut, Andi Sumangerukka mengajak kader PAN memahami kondisi fiskal daerah sekaligus mendukung upaya pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kolaborasi, menurutnya, perlu disertai pengelolaan anggaran yang tertib agar keterbatasan sumber daya tidak menghambat pencapaian prioritas pembangunan.

Sementara itu, Zulkifli Hasan meminta pengurus PAN yang baru dilantik menjaga soliditas organisasi dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ia juga mendorong kader partai mendukung program pemerintah daerah. "Tolong bantu dan didukung Gubernur. Saya tidak mau ada kader yang mengkritik Gubernur. Tidak boleh," tegas Zulkifli.

Zulkifli turut menekankan pentingnya pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Sejumlah bidang yang disorot ialah peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, serta pengembangan pusat-pusat ekonomi di daerah.

Persoalan transparansi dan akuntabilitas anggaran memiliki relevansi dengan perjalanan reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia setelah 1998. Reformasi mendorong tuntutan terhadap birokrasi yang lebih terbuka, pengawasan publik, dan pertanggungjawaban penggunaan uang negara. Pada tingkat internasional, prinsip serupa juga menjadi bagian dari agenda tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui SDG 16 tentang institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif.

Bagi Sulawesi Tenggara, tantangan utamanya ialah menerjemahkan prinsip tersebut ke dalam kebijakan anggaran yang terukur. Keterbatasan ruang fiskal membuat penentuan prioritas, efisiensi belanja, serta pengawasan pelaksanaan program menjadi penting agar pembangunan dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara lebih merata.

Pelantikan pengurus PAN se-Sultra itu menjadi ruang penyampaian pesan mengenai hubungan pemerintah daerah dan kekuatan politik dalam pembangunan. Dukungan terhadap program pemerintah diharapkan berjalan beriringan dengan transparansi, akuntabilitas, dan orientasi pada kepentingan publik.(*)

Didampingi Gubernu Sultra ASR, Menko Pangan Zulkifli Hasan Salurkan Tiga Ton Pupuk untuk Kelompok Tani di Konawe Selatan



Laporan: Lisna

KONAWE SELATAN, BP- Pemerintah memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian melalui penjagaan harga gabah, pembenahan distribusi pupuk, penggunaan mesin pertanian, dan pembangunan infrastruktur pengairan. Langkah tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rembuk Tani di Desa Pambulaa Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Rabu (7/10/2026), yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan bersama Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka.

Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan bahwa harga gabah di tingkat petani dijaga sebesar Rp6.500 per kilogram. Distribusi pupuk juga menjadi perhatian agar kebutuhan sarana produksi lebih mudah dipenuhi. Sementara itu, mekanisasi melalui penggunaan mesin tanam dan panen didorong untuk meningkatkan efisiensi kerja serta produktivitas pertanian.

Dukungan langsung diberikan kepada kelompok tani Desa Pambulaa Jaya berupa tiga ton pupuk non-subsidi, terdiri atas 1,5 ton urea dan 1,5 ton NPK. Selain bantuan tersebut, petani dapat mengajukan permohonan bantuan pompa air sesuai mekanisme yang berlaku. Pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan bendungan untuk memperkuat pasokan air bagi lahan pertanian.

Penguatan sektor pangan, menurut paparan dalam kegiatan tersebut, juga berkaitan dengan kesejahteraan petani dan nelayan. Zulkifli Hasan menyebut Nilai Tukar Petani (NTP) berada di kisaran 131, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sekitar 103. Pemerintah mendorong peningkatan NTN hingga 120 sebagai bagian dari upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian dan perikanan.

Di luar komoditas beras, pemerintah turut mendorong pengembangan budi daya perikanan di desa-desa dengan target mencapai 40.000 desa. Langkah ini diarahkan untuk memperluas ketersediaan sumber protein dan mendukung pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Dengan demikian, agenda ketahanan pangan tidak hanya berfokus pada jumlah produksi, tetapi juga keberagaman dan keterjangkauan sumber pangan.

Pemerintah juga melanjutkan pengembangan bibit dan varietas unggul untuk menjaga produktivitas di tengah perubahan iklim dan peningkatan kebutuhan pangan. Upaya ini relevan dengan pengalaman Indonesia pada 1984, ketika negara tersebut mencapai swasembada beras dan memperoleh pengakuan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO). Catatan sejarah itu memperlihatkan pentingnya dukungan teknologi, irigasi, sarana produksi, dan kebijakan pertanian yang berkelanjutan.

Dalam konteks internasional, FAO menetapkan Hari Pangan Sedunia pada 1979, yang diperingati setiap 16 Oktober, untuk meningkatkan perhatian terhadap persoalan kelaparan, gizi, dan produksi pangan. Agenda global tersebut menempatkan pertanian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan sebagai bagian penting dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Tantangan ini juga menegaskan perlunya kebijakan yang memperhatikan produksi sekaligus akses masyarakat terhadap pangan bergizi.

Kehadiran Andi Sumangerukka dalam Rembuk Tani menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap agenda pangan nasional. Kegiatan itu turut dihadiri Anggota Komisi IV DPR RI Eko Hendro Purnomo, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sultra Muhammad Fadlansyah, Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo, Wakil Bupati Konawe Selatan Wahyu Ade Pratama, Bupati Konawe Yusran Akbar, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra Muhammad Taufik, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Pangan, PT Pupuk Indonesia, penyuluh pertanian, serta kelompok tani Desa Pambulaa Jaya. Pertemuan tersebut menjadi ruang koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan dukungan dengan kebutuhan petani di lapangan.(*)

Pesan Umi naronah Saat Lantik Ketua PKK Gu dan Talaga Raya, PKK Buton Tengah Perkuat Pendidikan Anak, Ketahanan Keluarga, dan Ekonomi Warga





Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP-Pemberdayaan keluarga melalui pendidikan, penguatan ekonomi rumah tangga, dan pencegahan stunting menjadi perhatian Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Buton Tengah, Umi Noranah Azhari, S.Pd. Ia meminta pengurus PKK di tingkat kecamatan memperkuat program yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, terutama anak dan remaja.

Pesan tersebut disampaikan Umi Noranah saat melantik Ketua TP-PKK Kecamatan Gu dan Kecamatan Talaga Raya masa bakti 2026-2031 di Aula Pancana, Kantor Bupati Buton Tengah, Kamis (8/10/2026). Pelantikan itu menjadi momentum untuk memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan keluarga.

"Gerakan PKK memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga," demikian penekanan Umi Noranah dalam sambutannya.

Ia menilai 10 Program Pokok PKK perlu terus dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Inovasi di bidang kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, ekonomi keluarga, dan pembinaan karakter menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

Salah satu agenda yang mendapat perhatian khusus ialah dukungan terhadap wajib belajar 13 tahun, yang mencakup satu tahun pendidikan anak usia dini hingga jenjang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Umi Noranah meminta kader PKK ikut mendorong keluarga agar memastikan anak memperoleh kesempatan pendidikan yang memadai.

"Pendidikan merupakan investasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memutus mata rantai kemiskinan, dan mencegah pernikahan anak," menjadi penekanan dalam arahannya kepada jajaran PKK.

Secara historis, pemberdayaan keluarga telah menjadi bagian dari pembangunan sosial di Indonesia. Gerakan PKK berkembang dari program pendidikan kesejahteraan keluarga pada era 1950-an dan kemudian diperluas menjadi gerakan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan keluarga sebagai salah satu unit penting pembangunan. Dalam konteks internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2015, yang antara lain menekankan penghapusan kemiskinan, kesehatan yang baik, serta pendidikan berkualitas. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan sejumlah bidang kerja PKK, meskipun tidak berarti kedua program memiliki struktur kelembagaan yang sama.

Untuk menjalankan agenda itu, Umi Noranah meminta pengurus kecamatan membangun sinergi dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan kelurahan, serta masyarakat hingga tingkat dasawisma. Menurutnya, kedekatan kader dengan keluarga menjadi modal penting untuk mengenali persoalan warga sekaligus memastikan program pemberdayaan berjalan sesuai kebutuhan.

Selain pendidikan, kader PKK diharapkan berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting, penguatan ketahanan keluarga, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta pembentukan karakter anak dan remaja. Pelaksanaan program-program tersebut membutuhkan keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial organisasi.

Kegiatan pelantikan turut dihadiri Staf Ahli TP-PKK Buton Tengah Kartini Adam Basan, Camat Gu, Camat Talaga Raya, para ketua bidang, ketua kelompok kerja (Pokja), serta pengurus TP-PKK Kabupaten Buton Tengah. Umi Noranah mengajak seluruh jajaran bergerak bersama hingga ke rumah-rumah warga agar PKK menjadi kekuatan sosial yang aktif, inovatif, dan responsif dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.(*)

Buton Ajukan Enam Lokasi Lisdes 2026, PLTS Dipertimbangkan di Dusun Bajo





Laporan:Firman

BUTON, BP- Kendala geografis dan risiko keselamatan dalam pembangunan jaringan listrik mendorong Pemerintah Kabupaten Buton memperjuangkan alternatif elektrifikasi bagi masyarakat di wilayah yang belum terlayani secara memadai. Dalam sinkronisasi program Listrik Desa (Lisdes) 2026 bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah daerah mengajukan enam lokasi, termasuk Dusun Bajo, Desa Benteng, Kecamatan Lasalimu.

Wakil Bupati Buton Syarifuddin Saafa, S.T., mewakili pemerintah daerah dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis, 1 Oktober 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi untuk menyelaraskan kebutuhan elektrifikasi di daerah dengan perencanaan program pemerintah pusat.

Dusun Bajo menjadi salah satu lokasi yang memerlukan pendekatan khusus. Pembangunan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) menghadapi kendala karena jalur jaringan harus melintasi kawasan muara yang diketahui rawan buaya. Kondisi tersebut memunculkan pertimbangan keselamatan dan teknis dalam menentukan metode penyediaan listrik bagi warga.

Manager PLN UP3 Baubau, Dani Dwi Saputro, turut terlibat dalam pembahasan alternatif penyediaan listrik. Salah satu opsi yang diusulkan ialah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk setiap rumah tangga, dengan pilihan daya sekitar 900 watt atau 1.300 watt. Skema ini dipertimbangkan sebagai alternatif jaringan konvensional yang menghadapi kendala di lokasi tersebut.

Agar perencanaan dapat dilakukan secara tepat sasaran, data rumah tangga calon penerima perlu disiapkan melalui koordinasi pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Data tersebut diperlukan untuk memetakan kebutuhan energi, memperkirakan kapasitas daya, serta mendukung proses verifikasi calon penerima manfaat.

Pembahasan berlanjut melalui kegiatan coaching clinic pada Jumat, 2 Oktober 2026. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses pendalaman usulan agar kebutuhan teknis dan administrasi dapat diselaraskan sebelum program ditindaklanjuti. Pengajuan enam lokasi belum dengan sendirinya berarti seluruh lokasi telah ditetapkan sebagai penerima program.

Secara historis, pemerataan elektrifikasi telah menjadi bagian penting pembangunan Indonesia selama puluhan tahun. Perluasan jaringan listrik nasional menjadi salah satu instrumen untuk mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Di tingkat internasional, sistem energi terdesentralisasi, termasuk PLTS rumah tangga, juga dikembangkan untuk menjangkau komunitas terpencil yang sulit dihubungkan dengan jaringan utama. Pendekatan ini relevan untuk dipertimbangkan di wilayah dengan tantangan geografis, sepanjang disertai perencanaan kapasitas, pemeliharaan, dan keberlanjutan layanan.

Bagi Kabupaten Buton, pembahasan Lisdes 2026 menjadi langkah untuk mencari skema elektrifikasi yang sesuai dengan kondisi setiap lokasi. Usulan PLTS bagi warga Dusun Bajo masih memerlukan tindak lanjut dan verifikasi teknis oleh instansi terkait. Keberhasilan program nantinya tidak hanya ditentukan oleh tersedianya perangkat pembangkit, tetapi juga oleh keandalan pasokan energi dan kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat.(*)

Kemenkes Perkuat Kolaborasi Multidisiplin untuk Tingkatkan Penanganan Kanker

Peliput: Lisna



DENPASAR, BP-Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendorong penguatan kompetensi tenaga kesehatan dan kolaborasi lintas disiplin untuk meningkatkan kualitas penanganan kanker, mulai dari pencegahan, deteksi dini, pengobatan, hingga pemulihan pasien. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelayanan kesehatan di tengah kompleksitas penyakit yang membutuhkan penanganan terpadu.

Wakil Menteri Kesehatan RI Benjamin Paulus Octavianus menyampaikan hal itu saat membuka The 4th International Conference on Multidisciplinary Approaches in Health Sciences (ICMAHS) 2026 di Auditorium Poltekkes Kemenkes Denpasar, Selasa (6/10/2026). Konferensi yang berlangsung pada 6-7 Oktober itu mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi kesehatan, dan mahasiswa dari berbagai negara untuk membahas inovasi pelayanan kanker.

Menurut Benjamin, kanker membutuhkan keterlibatan berbagai disiplin ilmu karena komplikasinya kompleks. Kolaborasi antartenaga kesehatan diperlukan untuk mendukung ketepatan diagnosis, pemilihan terapi, serta peningkatan kualitas hidup pasien. "Penyakit kanker memiliki komplikasi kompleks sehingga membutuhkan keterlibatan berbagai disiplin ilmu untuk meningkatkan kualitas pelayanan pasien," ujarnya.

Konferensi ICMAHS 2026 mengusung tema Advancing Cancer Care Across the Continuum: Innovations in Early Detection, Precision Treatment, Survivorship, and Quality of Life. Pembahasan mencakup pengembangan deteksi dini, pengobatan presisi, serta dukungan bagi penyintas kanker setelah menyelesaikan terapi. Pendekatan tersebut menempatkan pelayanan kanker sebagai proses berkelanjutan, bukan semata-mata tindakan medis ketika penyakit telah berkembang.

Penguatan layanan kuratif itu perlu diimbangi dengan pencegahan. Kemenkes mendorong program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal. Benjamin menyoroti hipertensi dan diabetes sebagai contoh penyakit yang dapat berkembang tanpa gejala pada tahap awal, tetapi berpotensi menimbulkan kerusakan organ apabila tidak terdeteksi dan ditangani secara tepat.

Dalam pencegahan kanker serviks, Kemenkes juga mengintensifkan imunisasi Human Papillomavirus (HPV). Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan sasaran utama siswi kelas V dan VI sekolah dasar, sebelum diperluas ke kelompok usia lainnya sesuai ketersediaan anggaran. Imunisasi HPV merupakan salah satu upaya pencegahan kanker serviks yang melengkapi edukasi kesehatan dan pemeriksaan sesuai rekomendasi medis.

Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Erika Yulita Ichwan menekankan pentingnya kesinambungan penanganan kanker, mulai dari promosi kesehatan, deteksi dini, terapi yang tepat, hingga pendampingan setelah pengobatan. Ia juga mengingatkan bahwa perguruan tinggi kesehatan harus memastikan penelitian dan inovasi memberikan manfaat konkret, bukan berhenti pada publikasi atau prototipe.

"Kami ingin penelitian tidak berhenti pada publikasi dan inovasi tidak mandek sebagai prototipe. Keduanya harus diterjemahkan menjadi praktik berbasis bukti (evidence-based practice) serta rekomendasi bagi pembangunan kesehatan," kata Erika.

Pentingnya pencegahan kanker memiliki landasan historis dalam perkembangan kesehatan masyarakat dunia. Pada 1970-an, sejumlah negara mulai memperkuat pendekatan pengendalian kanker melalui edukasi, pemeriksaan, dan pengembangan terapi. Kemudian, pada 2006, vaksin HPV pertama memperoleh izin penggunaan di Amerika Serikat, menandai kemajuan penting dalam pencegahan infeksi penyebab sebagian besar kasus kanker serviks. Perkembangan tersebut memperkuat peran imunisasi sebagai bagian dari strategi pengendalian kanker, di samping deteksi dini dan pengobatan.

Di Indonesia, pengendalian kanker dan penyakit tidak menular menjadi bagian dari agenda pembangunan kesehatan melalui penguatan upaya promotif dan preventif. Program CKG serta imunisasi HPV merupakan contoh pendekatan yang menempatkan pencegahan dan deteksi dini sebagai bagian penting pelayanan kesehatan. Efektivitasnya tetap memerlukan dukungan edukasi, pemerataan akses, kesinambungan program, dan tindak lanjut medis bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam kesempatan tersebut, Benjamin turut mengapresiasi capaian indikator kesehatan Provinsi Bali, antara lain rendahnya angka stunting, tuberkulosis (TBC), dan kematian ibu. Kemenkes berencana mempelajari praktik baik dari Bali untuk menjadi bahan pengembangan kebijakan dan peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat nasional.

Wamenkes juga meninjau pameran inovasi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar. Produk makanan sehat yang dikembangkan Jurusan Gizi berpeluang menjadi varian menu program Makanan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Peluang tersebut membuka ruang bagi hasil pendidikan dan riset kesehatan untuk mendukung peningkatan gizi masyarakat, sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan dan penyelenggara pelayanan kesehatan.(*)

Mulai 2027, Pemerintah Renovasi 8.001 Puskesmas dan Bangun 1.988 Unit Baru



Laporan: Ardi

DENPASAR-Pemerintah menyiapkan pembenahan besar-besaran fasilitas kesehatan nasional selama 2027-2029, meliputi renovasi 8.001 puskesmas, pembangunan 1.988 puskesmas baru, dan pembenahan 441 rumah sakit umum daerah (RSUD). Program ini diarahkan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat pencegahan penyakit melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Octavianus menyampaikan rencana tersebut saat meresmikan UPTD Puskesmas III Denpasar Barat, Bali, Selasa (6/10/2026). Pembangunan puskesmas baru, menurut dia, diperlukan untuk mengurangi beban pelayanan di kawasan padat penduduk. Pemerintah juga akan memprioritaskan fasilitas dengan tingkat kerusakan paling parah serta menambah unit sinar-X bergerak (mobile X-ray) di seluruh puskesmas.

Di Bali, program itu mencakup renovasi 119 puskesmas, pembangunan ulang empat puskesmas yang rusak berat, dan pemecahan tujuh puskesmas yang masing-masing melayani lebih dari 60.000 penduduk. Langkah tersebut diharapkan mengurangi kepadatan layanan dan memperpendek jangkauan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, terutama di wilayah dengan kebutuhan pelayanan yang terus meningkat.

Benny menegaskan bahwa penguatan layanan primer harus disertai perubahan orientasi kebijakan kesehatan, dari penanganan penyakit menuju pencegahan. "Ke depan, fokus belanja kesehatan harus bergeser dari pengobatan di rumah sakit menuju pencegahan di fasilitas primer," ujarnya. Puskesmas dengan layanan ibu dan anak dinilai memiliki peran penting dalam mengurangi risiko kematian ibu dan bayi.

Namun, pembangunan infrastruktur dan pengadaan peralatan medis tidak akan cukup tanpa tenaga kesehatan yang kompeten. Benny mengingatkan, penyediaan radiografer dan dokter spesialis membutuhkan waktu serta perencanaan yang matang. "Membeli alat kesehatan bisa cepat, tetapi mencetak tenaga medis seperti radiografer dan dokter spesialis membutuhkan proses," katanya.

Di Denpasar, UPTD Puskesmas III Denpasar Barat menjadi contoh pengembangan layanan yang mengutamakan kebutuhan ibu dan anak. Fasilitas tersebut berdiri di kawasan yang sebelumnya merupakan bekas pasar loak dan tempat pembuangan sementara. Puskesmas ini beroperasi selama 24 jam, menyediakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), serta mengintegrasikan layanan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membantu penerbitan akta kelahiran bayi. Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan, "Kami ingin memastikan setiap ibu dan anak mendapat pelayanan yang aman, nyaman, dan ramah tanpa diskriminasi."

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar Anak Agung Ayu Agung Candrawati menambahkan, puskesmas tersebut telah terintegrasi dengan BPJS Kesehatan dan didukung layanan kegawatdaruratan Damakesmas (Denpasar Mantap Kesehatan Masyarakat) selama 24 jam. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa penguatan fasilitas kesehatan tidak hanya berkaitan dengan bangunan dan peralatan, tetapi juga kesinambungan layanan, pembiayaan, serta koordinasi antarlembaga.

Secara historis, penguatan layanan kesehatan primer menjadi bagian penting agenda kesehatan dunia sejak Deklarasi Alma-Ata 1978, yang menempatkan pelayanan kesehatan primer sebagai kunci pencapaian kesehatan bagi semua. Di Indonesia, arah tersebut sejalan dengan penguatan puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Meski demikian, keberhasilan program 2027-2029 akan ditentukan oleh realisasi anggaran, pemerataan tenaga kesehatan, kesiapan peralatan, dan kemampuan setiap daerah memastikan fasilitas yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (*)

PT FAREN GRAFIKA
Harian Pagi
Baubau Post
www.baubaupost.com

KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN

Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik

Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post

Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi

Pemimpin Umum: Fauzan NWA
Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi
Redpel: Prasetio
Korlip: Firman
Redaktur: Kasrun,Rahim
Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval, La Harman

Layouter: Ririn
Pracetak: Aditya
Cetak Jamaludin

Penerbit: PT FAREN GRAFIKA
Komisaris: Erna Agule
Direktur Utama: Andina Latief
Manager Keuangan: Nabila DAA
Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin
Kepala Sirkulasi: Robi
Administrasi: Salvana

Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara
Tlp 0402-2014287- Email: baubaupostt2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com

Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat:Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01
Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepala Biro Wakatobi: Risman
Kepala Biro Buton Utara: Kasrun
Kepala Biro Buton: La Harman
Kepala Biro Buton Selatan: Firman
Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin
Kepala Biro Sultra: Masuri

Agen Baubau: Jamaluddin
Agen Buton Selatan: Firman
Agen Buton: Samrihan
Agen Buton Utara: Kasrun

Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan,

Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim
Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks

KSAD Maruli Sebut Rumah Dinas TNI Jadi Markas Judi Online sebagai Hal Memalukan



Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan penggunaan rumah dinas TNI AD sebagai tempat operasional judi online telah mencoreng nama baik institusi TNI.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Dugaan pemanfaatan rumah dinas TNI Angkatan Darat (AD) sebagai lokasi operasional judi daring di Kompleks Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Cijantung, Jakarta, menjadi sorotan setelah seorang perwira menengah ditahan untuk menjalani pemeriksaan. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebut kasus tersebut memalukan dan menegaskan institusinya tidak akan melindungi prajurit yang terbukti terlibat.

"Ini justru hal yang sangat memalukan buat kami," kata Maruli saat ditemui di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).

Perkara tersebut terungkap pada Minggu (4/10/2026), setelah TNI AD menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di salah satu rumah di kompleks perumahan milik Angkatan Darat itu. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Kodim 0505/Jakarta Timur bersama unsur kewilayahan mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan mengamankan barang bukti.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal TNI Donny Pramono menjelaskan, petugas menemukan sejumlah komputer di beberapa ruangan yang diduga digunakan untuk menjalankan aktivitas judi daring. Dari lokasi tersebut, aparat menyita 32 unit komputer, 14 telepon seluler, dan sembilan kartu tanda penduduk (KTP).

Selain barang bukti elektronik, sebanyak 11 warga sipil turut diamankan. Mereka terdiri atas enam laki-laki dan lima perempuan yang selanjutnya dibawa ke Detasemen Polisi Militer (Denpom) untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan aktivitas di rumah tersebut.

Pemeriksaan juga menyasar unsur militer. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyatakan seorang prajurit telah ditahan di Markas Polisi Militer Kodam Jaya (Pomdam Jaya). Prajurit tersebut adalah Letnan Kolonel (Inf) Arman, yang diketahui menjabat Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap (Gartap) 1/ Jakarta.

Menurut Nas, rumah dinas itu ditempati oleh Arman. Namun, penyidik masih mendalami dugaan keterlibatan perwira tersebut dalam aktivitas perjudian daring, termasuk kemungkinan penyewaan atau pemanfaatan rumah dinas untuk kegiatan ilegal. Status dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan.

Maruli menegaskan TNI AD menolak segala bentuk perjudian daring dan tidak akan memberikan perlindungan institusional kepada personel yang melanggar hukum. "Kita pastikan enggak mungkinlah kita melindungi (oknum prajurit) yang seperti itu," ujarnya.

Kasus ini kembali menyoroti persoalan penyalahgunaan fasilitas negara dan tantangan pemberantasan perjudian daring di Indonesia. Secara historis, pemerintah Indonesia telah mengatur larangan perjudian melalui Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, sementara perkembangan teknologi memperluas praktik perjudian ke ruang digital. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026, ketentuan pidana perjudian juga diatur dalam kerangka hukum pidana nasional yang baru. Di tingkat internasional, kerja sama lintas negara menjadi penting karena layanan judi daring dapat melibatkan operator, jaringan pembayaran, dan infrastruktur digital yang berada di yurisdiksi berbeda.

TNI AD menyatakan tidak akan membiarkan fasilitas di lingkungan institusinya digunakan untuk kegiatan ilegal. Penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap aktivitas yang terjadi di rumah dinas tersebut, memastikan pihak-pihak yang terlibat, serta menentukan pertanggungjawaban berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang diperoleh.(*)

KPK Sita Uang Jutaan Rupiah Diduga Hasil Pungli dalam Kasus HGB Summarecon

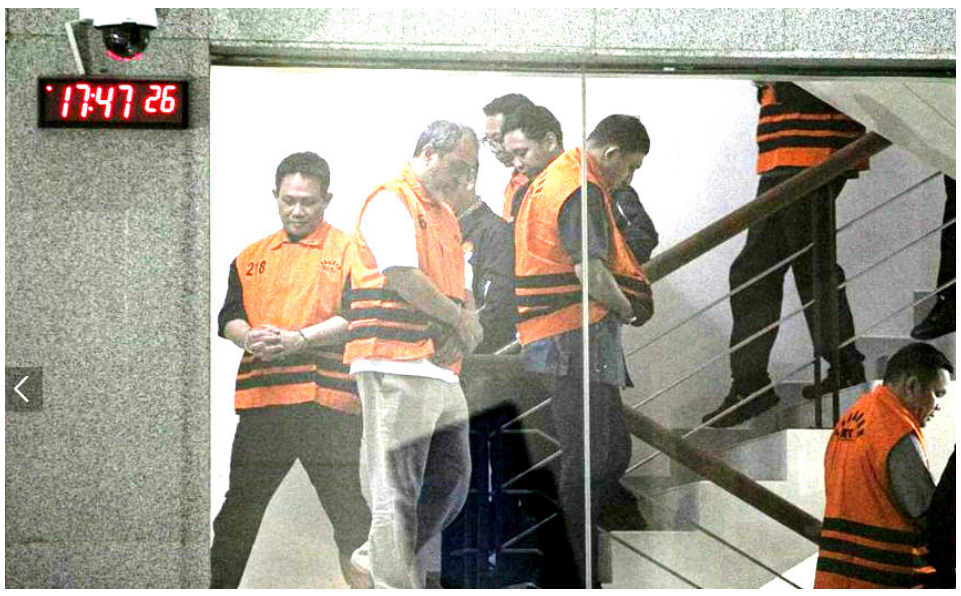

Ilustrasi. KPK menyita uang dari dugaan pungli saat pemeriksaan saksi kasus suap pengurusan HGB PT Summarecon.

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai jutaan rupiah yang diduga berasal dari pungutan liar dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN). Penyitaan dilakukan setelah penyidik memeriksa seorang pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada Kamis (8/10).

Pejabat yang diperiksa tersebut adalah Oma, Koordinator Kelompok Substansi Pendaftaran Tanah dan Ruang, Tanah Komunal dan Hubungan Kelembagaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi penyitaan uang tersebut melalui keterangan tertulis pada Jumat (9/10).

"Penyidik juga melakukan penyitaan uang dari pungutan liar yang diserahkan oleh saksi OM [Oma] senilai jutaan rupiah," kata Budi.

Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Selain Oma, penyidik memeriksa pengacara Marsellinus Ado Wawo dan staf Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Rizka Apriyani. Keterangan mereka didalami untuk menelusuri proses permohonan pembukaan blokir lahan PT Summarecon dan kaitannya dengan dugaan permintaan uang oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Sementara itu, Eko Yufri Krismawan N, saksi dari kalangan swasta, tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap yang bersangkutan guna melengkapi keterangan dalam proses penyidikan.

KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, dan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi.

Empat tersangka lainnya ialah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi. KPK menyebut Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Seluruh tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (14/9). Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 19 orang dan menemukan barang bukti berupa uang senilai Rp106,3 miliar. Penyidikan kemudian berlanjut untuk menelusuri dugaan suap, penerimaan lainnya, serta aliran uang yang berkaitan dengan pengurusan pertanahan.

Secara historis, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia diperkuat melalui pembentukan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pada tingkat internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Antikorupsi atau United Nations Convention against Corruption (UNCAC) pada 31 Oktober 2003. Indonesia mengesahkan konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Kerangka nasional dan internasional itu menempatkan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas pemerintahan. (*)

Bupati Azhari Siapkan Rp250 Juta untuk Pengembangan Kawasan Masjid Nurhasanah Sebagai Ikon Buton Tengah

dan masyarakat.

Selain pembenahan infrastruktur, Pemkab Buton Tengah merencanakan pemberian insentif atau gaji resmi bagi imam dan pengurus masjid. Rencana ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap pelayanan keagamaan. Namun, rincian mekanisme pemberian insentif dan tahapan pembangunan belum dijelaskan dalam keterangan tersebut.

Rencana pengembangan kawasan itu disampaikan di hadapan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Desa Teluk Lasongko, tokoh adat, tokoh agama, serta warga setempat. Kehadiran berbagai unsur masyarakat tersebut menunjukkan bahwa penataan kawasan masjid turut berkaitan dengan kebutuhan ruang publik dan pengelolaan fasilitas bersama.

Secara historis, masjid memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga sebagai pusat pendidikan, musyawarah, dan kegiatan sosial. Di tingkat internasional, masjid juga berkembang sebagai bagian dari kehidupan komunitas Muslim. Dalam konteks Buton Tengah, rencana penataan Masjid Nurhasanah diharapkan dapat memperkuat fungsi sosial dan keagamaan tersebut. Realisasi anggaran, kejelasan tata kelola, serta pelibatan masyarakat akan menjadi faktor penting dalam mewujudkan kawasan itu sebagai ikon daerah.(*)

DP3AKB dan RSUD Baubau Integrasikan Layanan bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

memastikan pemulihan korban tidak berhenti pada perawatan fisik, tetapi juga mencakup kondisi psikologis dan dukungan terhadap keluarga.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Peningkatan Layanan Fisik dan Psikis bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang ditandatangani pada 27 Juli 2026 di Aula Palagimata, Kantor Wali Kota Baubau. Dokumen itu ditandatangani Kepala DP3AKB Kota Baubau Abdul Rahman, S.Pd., M.Si., dan Direktur RSUD Kota Baubau dr. Kenangan, MARS., M.Kes. Abdul Rahman menyampaikan penjelasan mengenai kerja sama tersebut melalui siaran pers pada Jumat (9/10/2026).

Abdul Rahman menjelaskan, peningkatan kebutuhan penanganan korban menuntut koordinasi antarlembaga agar pelayanan berjalan lebih efektif. “Meningkatnya kebutuhan penanganan korban, baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual, memerlukan strategi yang komprehensif dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai instansi terkait,” ujarnya.

Dalam skema pelayanan yang disepakati, korban dapat mendatangi Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD secara mandiri atau dengan pendampingan keluarga, masyarakat, petugas puskesmas, kepolisian, maupun petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Setibanya di rumah sakit, korban menjalani triase untuk menentukan tingkat kegawatan dan prioritas penanganan, kemudian mendapatkan pelayanan sesuai standar prosedur operasional yang berlaku.

Setelah pemeriksaan dan penanganan awal, korban dapat menjalani rawat inap, observasi, atau diperbolehkan pulang berdasarkan kondisi medisnya. DP3AKB selanjutnya menyediakan konseling melalui psikolog profesional bagi korban dan keluarga. Integrasi tersebut diharapkan membantu korban menghadapi dampak psikologis kekerasan yang dapat memengaruhi proses pemulihan.

Pembagian tanggung jawab dalam PKS menempatkan DP3AKB sebagai pihak yang melakukan advokasi, sosialisasi pencegahan kekerasan, penguatan partisipasi masyarakat, serta pelatihan bagi tenaga medis RSUD. DP3AKB juga bertugas menyosialisasikan mekanisme layanan di lingkungan dinas dan UPTD PPA serta menyediakan pendampingan psikologis. Adapun RSUD menyiapkan fasilitas pelayanan terpadu, sarana komunikasi melalui telepon yang dapat diakses masyarakat, panduan dan standar operasional pelayanan, serta tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan terkait penanganan korban.

Secara historis, perlindungan perempuan dan anak telah menjadi perhatian internasional melalui pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1979 dan Konvensi Hak Anak pada 1989. Di Indonesia, perlindungan tersebut antara lain diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak. Kerangka tersebut menegaskan pentingnya perlindungan korban melalui dukungan lintas sektor.

Abdul Rahman menegaskan, kerja sama DP3AKB dan RSUD menjadi bagian dari upaya membangun sistem perlindungan yang lebih aman dan berpihak kepada korban. “Alur pelayanan tersebut memastikan penanganan tidak hanya berfokus pada pemulihan fisik, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis yang sangat memengaruhi proses pemulihan secara menyeluruh,” ungkapnya. Pelaksanaan layanan terpadu ini diharapkan memperkuat akses korban terhadap perawatan dan pendampingan agar dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.(*)

Danantara Tinjau Tambang Buton, Tegaskan Tak Ada Pabrik Asbuton di Karawang

Senior Associate Cluster Infra MD Business 3 PT Danantara Asset Management (DAM), Aditya Hutama Iswardi, menegaskan bahwa kegiatan peletakan batu pertama (groundbreaking) di Karawang bukan pembangunan pabrik Asbuton baru. “Groundbreaking di Karawang sebenarnya sebagai bentuk mendukung ekosistemnya, jadi bukan membangun pabrik,” kata Aditya. Ia menyatakan Danantara tidak memiliki rencana membangun pabrik Aspal Buton di Karawang karena berbagai opsi pengembangan masih dalam kajian internal.

Aditya menjelaskan, peninjauan di Buton merupakan bagian dari dukungan terhadap arahan Presiden dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk meningkatkan penggunaan Aspal Buton. Danantara bersama BUMN terkait, termasuk PT Wijaya Karya (Wika) dan PT Hutama Karya, tengah mengevaluasi produk yang tersedia, bahan baku, fasilitas pengolahan, serta kesiapan teknis pemanfaatannya. “Kami ke sini untuk melihat produknya dan kesiapan teknisnya untuk bisa digunakan produknya,” ujarnya.

Rombongan meninjau fasilitas dan lahan pertambangan PT Wika Bitumen di kawasan Mantowu dan Kabungka, Kecamatan Pasarwajo, serta Pelabuhan Banabungi dan Nambo. Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Utama PT Hakaaston M. Rozi Rinjayadi, General Manager Operasi PT Wika Bitumen Pujo, perwakilan KPMG Fahmi, serta Ade dari tim khusus Asbuton Hakaaston. Pemeriksaan pelabuhan dilakukan untuk menilai dukungan distribusi jika kebutuhan Asbuton meningkat secara nasional.

Rozi mengatakan, Hakaaston berkepentingan memastikan kesiapan Asbuton karena perusahaan tersebut bergerak dalam bidang operasi dan pemeliharaan jalan tol serta aplikasi aspal. Di tengah fluktuasi harga minyak dan aspal impor akibat dinamika global, ia menilai penguatan penggunaan material dalam negeri menjadi penting. “ Kami berharap Aspal Buton bisa match dengan aspal impor sehingga komersialisasinya atau penetrasi ke pasarnya bisa dilakukan segera,” katanya. Perluasan pasar diharapkan menghidupkan kembali industri aspal di Kabupaten Buton, termasuk PT Wika Bitumen dan perusahaan Asbuton lainnya.

Aspal Buton memiliki sejarah panjang dalam industri jalan Indonesia. Pengelolaannya telah dimulai sejak 1925 pada masa Hindia Belanda, sedangkan pemanfaatannya untuk pengaspalan jalan di Indonesia tercatat sejak 1970, antara lain pada ruas Cimahi Padalarang, Jawa Barat, sepanjang tiga kilometer. Pada dekade 1980-an, Asbuton pernah mencapai masa kejayaan sebelum pemanfaatannya menurun. Secara internasional, aspal alam juga dikenal dari Trinidad di kawasan Karibia. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa kekayaan sumber daya alam perlu ditopang teknologi pengolahan, standar mutu, harga yang kompetitif, dan kepastian pasar.

Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra menyambut kunjungan tersebut sebagai kesempatan memperlihatkan potensi Asbuton langsung dari daerah sumbernya. “Kedatangan mereka di sini ingin melihat langsung extraction plant di Buton, salah satunya di Wika,” ujarnya. Pemerintah Kabupaten Buton berharap kajian Danantara dan BUMN membuka peluang sinergi pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pelaku usaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan aspal lokal.

Hasil kajian teknis akan menjadi dasar untuk menentukan langkah pengembangan berikutnya, terutama terkait kualitas produk, kesiapan produksi, daya saing terhadap aspal impor, dan kesinambungan distribusi. Bagi Kabupaten Buton, peningkatan pemanfaatan Asbuton berpotensi memperkuat industri daerah, memperluas kegiatan ekonomi masyarakat, dan mendukung kebutuhan pembangunan jalan nasional. Namun, realisasi peluang tersebut bergantung pada hasil evaluasi dan kemampuan produk memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan.(*)

Bupati Buton Selatan H Muh Adios Optimalkan Program Yon TP 871 untuk Tingkatkan Produksi Cabai Daerah

moditas, mulai dari sayuran dan buah-buahan hingga peternakan dan perikanan. Program tersebut dikembangkan untuk mendukung ketersediaan pangan di Kabupaten Buton Selatan sekaligus membuka peluang peningkatan produksi pangan segar bagi masyarakat.

“Saya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Yon TP 871/Lamaindo. Semoga kegiatan ini terus berkembang, terutama melalui perluasan area tanam cabai, sehingga dapat semakin memperkuat ketahanan pangan kita dan menjamin ketersediaan bahan pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Buton Selatan,” ujar Adios.

Pengembangan tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan bahan pangan segar dan berkualitas bagi pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Sinergi pemerintah daerah dan TNI dinilai penting untuk memperkuat rantai pasok pangan, mulai dari produksi hingga pemanfaatannya dalam program pemenuhan gizi masyarakat.

Meski memiliki peluang pengembangan, kegiatan pertanian dan perikanan itu masih menghadapi kendala ketersediaan air. Pasokan air diperlukan untuk mengairi kebun sayuran yang masih dalam tahap pertumbuhan serta menunjang budidaya ikan menggunakan sistem bioflok. Pemerintah daerah dan pihak batalyon berupaya mengoptimalkan sumber mata air di sekitar lokasi agar kebutuhan air dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

Secara historis, ketahanan pangan telah menjadi perhatian nasional sejak Indonesia mengembangkan kebijakan intensifikasi pertanian pada masa Revolusi Hijau pada 1970-an. Di tingkat internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) sejak 1945 mendorong upaya peningkatan gizi dan standar hidup melalui perbaikan produksi serta distribusi pangan. Pengalaman tersebut menegaskan bahwa ketersediaan pangan membutuhkan dukungan produksi, pengelolaan sumber daya, dan distribusi yang memadai. Perluasan tanam cabai di Buton Selatan menjadi salah satu langkah lokal yang relevan dengan agenda tersebut.

Dalam kunjungan itu, Adios didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Selatan, Sadidi, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Nurdin Mardan, serta Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, Mas Udin. Pendampingan jajaran teknis diharapkan memperkuat koordinasi untuk mengatasi kendala air dan mendukung pengembangan pertanian, peternakan, serta perikanan Yon TP 871/Lamaindo secara berkelanjutan. (*)

Revisi RTRW Buton Selatan Cegah Tumpang Tindih Lahan, Kantah Buton Selatan Perkuat Akurasi Data Spasial

target penetapan RTRW pada 2027.

Kepala Kantah Buton Selatan Asnani, mengatakan integrasi data pertanahan dengan dokumen tata ruang menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan kebijakan pemanfaatan ruang disusun berdasarkan informasi yang akurat. Komitmen tersebut dibahas bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Buton Selatan dalam pertemuan koordinasi di Batauga, Kamis (8/10/2026).

“Kami dari Kantah juga siap memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis (bantek) dalam proses penyusunan RDTR maupun penyesuaian RTRW Buton Selatan. Koordinasi dengan Dinas PUPR ini sangat penting agar tata ruang yang disusun sejalan dengan data pertanahan yang ada,” ujar Asnani.

Salah satu perhatian dalam pembenahan dokumen tersebut ialah penyesuaian pola ruang setelah adanya kesepakatan pemanfaatan bersama Pulau Kawi-kawia. Kantah bersama Dinas PUPR juga memetakan penyesuaian peta dasar untuk memperkuat kepastian pemanfaatan lahan sekaligus mendukung penyelesaian batas-batas wilayah administrasi.

Asnani menegaskan, sinergi antarlembaga diperlukan agar pemetaan, basis data, dan proses penerbitan kesesuaian tata ruang terhubung dalam satu sistem yang selaras. “Sinergi antara Kantah dan Dinas PUPR ini menjadi kunci agar seluruh dokumen tata ruang, mulai dari pemetaan hingga database penerbitan kesesuaian tata ruang, dapat terintegrasi dengan baik sebelum ditindaklanjuti ke Kementerian ATR/BPN,” jelasnya.

Secara historis, Indonesia telah memiliki kerangka hukum nasional mengenai penataan ruang melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Regulasi tersebut menjadi bagian dari perkembangan kebijakan penataan ruang nasional, yang selanjutnya mengalami perubahan melalui ketentuan terkait Cipta Kerja. Kerangka hukum ini menegaskan pentingnya perencanaan ruang yang terarah untuk mendukung pembangunan dan mengendalikan pemanfaatan wilayah.

Dalam konteks internasional, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perumahan dan Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan atau Habitat III di Quito, Ekuador, pada 2016 menghasilkan New Urban Agenda. Agenda tersebut mendorong perencanaan wilayah dan perkotaan yang inklusif, terintegrasi, serta berkelanjutan. Meski berfokus pada pembangunan perkotaan, prinsip perencanaan terpadu itu relevan sebagai konteks bagi upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola ruang.

Kantah Buton Selatan berharap pendampingan teknis dan pembenahan data dasar berjalan lancar sehingga target Persetujuan Substansi (Persub) dan penetapan RTRW dapat dituntaskan tepat waktu pada 2027. Upaya tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemanfaatan ruang yang lebih tertib, terukur, dan selaras dengan data pertanahan.(*)

Selasa, 13 Oktober 2026 | BAUB AU POST | www.baubaupost.com

Peringati HUT Baubau, Job Fair 2026 Hadirkan 598 Lowongan dari 14 Perusahaan, Ada Kesempatan Bekerja di Tiga Negara Tujuan



Laporan: Ardi

BAUBAU, BP - Sebanyak 598 lowongan kerja ditawarkan melalui Baubau Job Fair 2026 yang digelar Pemerintah Kota Baubau pada 12-15 Oktober 2026. Bursa kerja yang dipusatkan di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), depan SMA Negeri 1 Baubau, itu melibatkan 14 perusahaan dengan peluang penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Baubau, Dra. Hj. Amalia Abibu, M.Si., mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Jadi ke-485 Kota Baubau dan HUT ke-25 sebagai daerah otonom. Bursa kerja dibuka untuk umum tanpa biaya, setiap hari pukul 09.00-16.00 WITA.

Dari total lowongan yang tersedia, sebanyak 281 posisi diperuntukkan bagi penempatan lokal melalui 10 perusahaan. Mitra yang terlibat antara lain Zenith Premiere Hotel Baubau, RS Siloam melalui PT Bina Bahtera Sejati, PT Bank BTPN Syariah Tbk., PT Matahari Putra Prima Tbk. (Hypermart), Maxima Klinik & Laboratorium, FIFGROUP, BRI Life, PT Indomarco Prismatama (Indomaret), PT Pesta Pora Abadi (Mie Gacoan), serta PT Midi Utama Indonesia Tbk. (Alfamidi).

Sementara itu, 317 lowongan lainnya diarahkan untuk penempatan di Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong. Peluang tersebut difasilitasi empat perusahaan penyalur tenaga kerja, yakni PT Arwana Citra Lestari, PT Lia Central Utama, PT Tritunggal Nuansa Primatama, dan PT Khaliffah Fierdaus Aulia. Calon pekerja yang berminat pada penempatan luar negeri perlu memastikan informasi kontrak, legalitas perusahaan penempatan, serta persyaratan kerja sesuai negara tujuan.

Amalia mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut, terutama lulusan baru, mahasiswa, pelajar, dan pencari kerja berpengalaman. "Kami mengimbau masyarakat Kota Baubau dan sekitarnya untuk memanfaatkan Baubau Job Fair 2026 sebagai kesempatan menjaki peluang karier sesuai dengan kualifikasi masing-masing," demikian inti imbauan yang disampaikan melalui siaran pers, Jumat (9/10/2026).

Selain mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, kegiatan ini menyediakan sesi walk-in interview atau wawancara langsung, konsultasi karier, pelatihan, dan layanan ketenagakerjaan. Panitia juga menghadirkan pemeriksaan kesehatan gratis, pengecekan bantuan sosial melalui aplikasi Perlinsos IKD untuk verifikasi status dan pemutakhiran data, serta ruang temu kemitraan antara perusahaan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Penyelenggaraan bursa kerja daerah ini berlangsung di tengah tantangan ketenagakerjaan yang juga dihadapi banyak negara. Secara internasional, Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menjadikan penciptaan pekerjaan layak, perlindungan pekerja, dan perluasan kesempatan kerja sebagai bagian penting dari agenda pembangunan. Di Indonesia, layanan bursa kerja menjadi salah satu sarana mempertemukan kebutuhan tenaga kerja perusahaan dengan pencari kerja, meskipun ketersediaan lowongan tetap perlu disesuaikan dengan keterampilan, pengalaman, dan persyaratan setiap posisi.

Pencari kerja yang ingin mengikuti Baubau Job Fair 2026 cukup menyiapkan berkas lamaran dan curriculum vitae (CV). Seluruh layanan bursa kerja dapat diakses secara gratis selama empat hari pelaksanaan, 12-15 Oktober 2026, di PLUT Kota Baubau.

Catatan redaksi: Kutipan langsung pada paragraf kelima disusun sebagai parafrasa imbauan berdasarkan bahan yang diberikan, bukan kutipan verbatim. Sebelum diterbitkan sebagai ucapan langsung, redaksi sebaiknya mengonfirmasi kalimat persisnya kepada narasumber. Data historis nasional dan internasional dalam paragraf ketujuh merupakan konteks umum; belum ditambahkan angka historis spesifik karena belum diverifikasi dari sumber resmi.(*)

HUT ke-25 Kota Baubau, Lomba Olahraga dan Tradisi Lokal Semarakkan Perayaan



Laporan: Prasetio M

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau menggabungkan pengembangan prestasi olahraga dan pelestarian warisan budaya dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-485 Baubau dan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 sebagai daerah otonom pada 2026. Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kota Baubau La Ode Darus Salam, S.Sos., M.Si., yang mewakili Wali Kota H. Yusran Fahim, S.E., pada Rabu sore (7/10/2026).

Rangkaian kegiatan itu mencakup pertandingan bola voli dan bulu tangkis serta perlombaan seni dan budaya, mulai dari perahu hias, menyanyi solo lagu daerah, paduan suara, hingga Tula-tula Wolio. Perpaduan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi pembinaan atlet sekaligus menjaga tradisi lokal yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Buton.

"Melalui kejuaraan bola voli dan bulu tangkis, kita ingin melahirkan bibit atlet berprestasi sekaligus memupuk jiwa sportivitas serta gaya hidup sehat," kata La Ode Darus Salam dalam sambutannya.

Menurut Sekda, peringatan hari jadi daerah tidak semestinya berhenti pada kegiatan seremonial. Agenda olahraga dan kebudayaan perlu menjadi sarana memperkuat kebersamaan, menumbuhkan kebanggaan terhadap sejarah daerah, serta meneruskan nilai-nilai leluhur kepada generasi muda.

Salah satu kegiatan yang mendapat ruang dalam rangkaian perayaan ialah lomba Tula-tula Wolio, tradisi penuturan atau cerita lisan masyarakat Wolio. Tradisi semacam ini memiliki peran dalam pewarisan ingatan kolektif, nilai sosial, dan pengetahuan lokal. Pelestariannya membutuhkan keterlibatan masyarakat, terutama generasi muda, agar tradisi tetap dikenal dan dipraktikkan di tengah perubahan zaman.

Secara historis, penetapan Hari Jadi Baubau berkaitan dengan perjalanan panjang peradaban Buton. Tanggal 17 Oktober 1541 ditetapkan sebagai Hari Jadi Baubau melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010. Sementara itu, pembentukan Kota Baubau sebagai daerah otonom didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001. Kedua tonggak tersebut mencerminkan dimensi sejarah kebudayaan dan perjalanan pemerintahan modern Baubau.

Pesan pelestarian budaya itu berjalan beriringan dengan penekanan terhadap sportivitas. La Ode Darus Salam meminta para peserta menunjukkan kemampuan terbaik dengan tetap menjaga persaudaraan. Ia juga mengingatkan juri dan wasit agar menjalankan tugas secara adil, objektif, dan berintegritas sehingga hasil perlombaan dapat diterima oleh seluruh peserta.

Pembukaan kegiatan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kota Baubau Natas Aryu Prawira Tamim, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Baubau beserta jajaran, pimpinan BPD Baubau, para juri, serta ratusan atlet dan peserta lomba. Acara juga diisi ekshibisi bola voli yang mempertemukan tim Pemerintah Kota Baubau dengan tim Forkopimda, yang melibatkan Dandim 1413/Buton, Danposal, Wakil Ketua DPRD, Ketua KONI Baubau beserta anggota, dan pimpinan BPD Baubau.

Dalam konteks internasional, hubungan olahraga dan kebudayaan juga mendapat perhatian UNESCO. Piagam Internasional Pendidikan Jasmani, Aktivitas Fisik, dan Olahraga UNESCO menempatkan permainan tradisional serta olahraga masyarakat adat sebagai bagian dari kekayaan warisan budaya yang perlu dilindungi dan dikembangkan. UNESCO juga menekankan nilai olahraga dalam membangun kerja sama, kesetaraan, sikap saling menghormati, dan perdamaian. Prinsip tersebut relevan dengan upaya Baubau menjadikan perayaan daerah sebagai ruang untuk merawat tradisi sekaligus memperkuat persatuan masyarakat.

Melalui rangkaian perlombaan ini, Pemerintah Kota Baubau diharapkan dapat memperkuat pembinaan atlet, memperluas partisipasi masyarakat, dan menjaga kesinambungan warisan budaya Buton. Tantangannya ialah memastikan kegiatan perayaan tidak hanya ramai ketika berlangsung, tetapi juga memberikan manfaat berkelanjutan bagi pengembangan olahraga dan pewarisan tradisi lokal.(*)